



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KEBIJAKAN PRIORITAS *DESK* PEMBERANTASAN PERJUDIAN DARING

**Ahmad Budiman**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

**Devindra Oktaviano**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[devindra.oktaviano@dpr.go.id](mailto:devindra.oktaviano@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

*Desk* Pemberantasan Perjudian Daring, bersama dengan *Desk* Keamanan Siber dan Perlindungan Data menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Kamis, 21 November 2024. Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan tersebut memaparkan capaian dan langkah-langkah strategis terkait penanganan perjudian daring (*online*). Mendampingi Menko Polkam, turut hadir pula Menteri Komdigi, Meutya Hafid; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikstisainstek) Satryo S. Brodjonegoro; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Deputi Bank Indonesia Judo Agung, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Pada konferensi pers tersebut, Menko Polkam, Budi Gunawan, mengungkapkan tiga langkah prioritas yang akan menjadi fokus utama *Desk* tersebut ke depan. *Pertama*, *Desk* Pemberantasan Judi Daring akan bekerja sama dengan penyedia jasa internet dan *platform* teknologi untuk melakukan pemblokiran sistematis terhadap situs-situs judi daring. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi akses masyarakat terhadap perjudian daring. *Kedua*, penelusuran aliran uang yang mencakup upaya untuk berkoordinasi secara internasional dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang seringkali menyertai praktik judi daring. *Ketiga*, kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi daring. Budi Gunawan menekankan bahwa judi daring seringkali merupakan bentuk penipuan oleh operator yang memberikan harapan palsu kepada pemain bahwa mereka bisa menang, padahal sistem permainan sudah dirancang sedemikian rupa agar pemain pasti kalah.

Pada konferensi pers tersebut, Polri menghadirkan dua orang tersangka jaringan perjudian daring dari situs Naga Kuda 138. Salah satu tersangka mempromosikan judi daring melalui pemberian (*gift*) ke influencer di media sosial yang *me-endorse* situs judi mereka. Sementara satu orang tersangka lainnya adalah operator situs dan rekening operasional Naga Kuda 138.

*Desk* Pemberantasan Perjudian Daring dibentuk pada 4 November 2024 di bawah Koordinasi Menko Polkam. *Desk* ini dibentuk untuk mengatasi masalah judi daring yang semakin marak di Indonesia, dengan fokus pada upaya pemberantasan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan.

Selama enam belas hari kerja pertama, *Desk* telah memberikan beberapa hasil yang signifikan. Menurut data yang disampaikan, sebanyak 104.819 situs judi daring telah berhasil ditutup. Jika diakumulasikan sejak pemerintahan baru mulai bekerja pada 20 Oktober 2024, maka total sekitar 380 ribuan situs telah ditutup. Selain itu, 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta terkait judi daring telah diblokir, sebagai bagian dari upaya untuk membatasi akses masyarakat terhadap konten yang berbahaya. Menkomdigi telah bersurat kepada kedua *platform* di atas beserta TikTok untuk kooperatif dalam memblokir kata kunci judi daring. *Desk* ini juga melakukan penelusuran aliran uang yang terkait dengan judi daring. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan instansi terkait lainnya, mereka berupaya mengidentifikasi dan menindak jaringan judi daring yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara bersamaan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring. Menurut data pemerintah, sekitar 8,8 juta orang di Indonesia terlibat dalam judi daring, dengan mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian daring telah menjadi masalah sosial yang serius. Banyak individu terjebak dalam siklus kerugian finansial akibat praktik-praktik tidak etis dari bandar judi. Tantangan lainnya yang perlu dicermati adalah jaringan transnasional perjudian daring di kawasan Asia Tenggara. Tumbuhnya industri perjudian di Kamboja dan Filipina memacu peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia, untuk dipekerjakan di industri perjudian, utamanya yang berbasis elektronik.

## Atensi DPR

Prevalensi judi daring yang masif di tengah-tengah masyarakat, bahkan aparaturnya pemerintah, menimbulkan urgensi bagi pemerintah untuk bekerja cepat dan optimal dalam mengambil setiap tindakan penanganan yang diperlukan. Komisi I DPR RI dapat melaksanakan fungsi pengawasan melalui panitia kerja yang secara berkesinambungan memonitor capaian kinerja *Desk* Pemberantasan Judi Daring. Melalui panitia kerja ini juga, Komisi I DPR RI dapat meminta Lembaga Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional menyajikan kajian dan usulan langkah taktis yang dapat memperkuat kapabilitas dan kapasitas *Desk* tersebut. Komisi I DPR RI juga dapat meminta Kementerian Luar Negeri memperkuat konsolidasi antarnegara ASEAN untuk menanggulangi kejahatan lintas batas imbas maraknya industri judi daring di sejumlah negara ASEAN, seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perdagangan orang.

## Sumber

antaranews.com, 21 November 2024;  
cnbcindonesia.com, 22 November 2024;  
japos.com, 22 November 2024;  
kompas.com, 22 November 2024;  
tempo.co, 22 November 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024